

Peran Pemerintah Desa Dalam Partisipasi Peningkatan Aset Desa (Studi Kasus Sungai Bengawan Mati, Desa Tejoasri, Lamongan)

The Role of Village Government in Participation in Village Asset Enhancement (Case Study of the Bengawan Mati River, Tejoasri Village, Lamongan)

Putri Wulandari¹, Dewi Fitrotus Sa'diyah²

Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya

email: putriwulandari.22022@mhs.unesa.ac.id

Program Studi Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia, Fakultas Pascasarjana, Universitas Negeri Surabaya

email: dewisadiyah@unesa.ac.id

Abstrak

Partisipasi peningkatan aset desa di Desa Tejoasri, Lamongan dengan studi kasus Sungai Bengawan Mati melalui pratinjau aspek partisipasi masyarakat. Latar belakang dalam penelitian ini adalah pengelolaan sungai masih belum didukung dengan regulasi yang jelas, pemberdayaan masyarakat yang belum optimal yang berdampak pada evaluasi program dan pemanfaatan ekonomi yang masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat yang terdiri dari 4 indikator yakni, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengambilan manfaat sudah melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa dan kegiatan pemberdayaan. Namun, partisipasi masyarakat belum optimal dan terbatas dalam tahap evaluasi. Simpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan sungai bengawan mati telah melibatkan masyarakat tetapi belum sepenuhnya berjalan. Oleh karena itu, pemerintah desa agar memperkuat mengenai regulasi pengelolaan sungai yang jelas, mengembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan membuka ruang evaluasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi guna mengoptimalkan pemanfaatan sungai bengawan mati.

Kata Kunci: peran pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, evaluasi .

Abstract

The role of the village government in participating in the improvement of village assets in Tejoasri Village, Lamongan, with a case study of the Bengawan Mati River through a preview of community participation aspects. The background to this study is that river management is still not supported by clear regulations, and community empowerment is not yet optimal, which has an impact on program evaluation and economic utilization that is still limited. This study uses a qualitative method through a descriptive approach using a community participation theory consisting of four indicators, namely decision making, implementation, benefit sharing, and evaluation. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques used the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The

results of the study show that the role of the village government in decision making, implementation, and benefit sharing has involved community participation through village deliberations and empowerment activities. However, community participation is not yet optimal and is limited in the evaluation stage. The conclusion of this study is that the management of the Bengawan Mati River has involved the community but has not been fully implemented. Therefore, the village government should strengthen clear regulations on river management, develop and improve community empowerment, and open up space for evaluation for the community to participate in order to optimize the utilization of the Bengawan Mati River.

Keywords: *the role of the village government, community participation, decision-making, implementation, benefit-sharing, evaluation.*

Pendahuluan

Sumber daya alam perairan merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan hidup masyarakatnya yang bergantung hidup dari hasil perairan dan salah satunya yakni sungai. Definisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, dijelaskan bahwa wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu kesatuan wilayah sungai yang ada dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi. Sungai dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan harian hingga tempat diadakannya acara adat, sosial dan budaya. Masyarakat yang tinggal di pinggir sungai, menjadikan sungai sebagai sumber pendapatan hidup mereka dan menciptakan peluang mensejahterahkan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal. Pemanfaatan sungai yang dikelola dengan baik dari pihak setempat dan juga keterlibatan warga dapat berdampak pada taraf hidup masyarakatnya.

Desa Tejoasri, Kabupaten Lamongan terdapat sungai yang dinamakan Sungai Bengawan Mati yang merupakan aliran yang sudah tidak aktif tersalurkan dari Bengawan Solo. Desa Tejoasri terdiri dari 4 dusun dengan jumlah penduduk kurang lebih 5.745 jiwa (survei 2023) dan mayoritas bekerja sebagai petani, pekerja kasar, peternak ikan air tawar (budidaya ikan air tawar), guru, pekerja bangunan dan membuka usaha warung. Sungai bengawan mati ini telah dimanfaatkan oleh sebagai masyarakat desa sebagai sumber pendapatan dengan bekerja sebagai nelayan dan pembudidaya. Potensi yang yang dihasilkan sungai bengawan mati menjadikan masyarakatnya hidup bergantung dengan sungai. Selain itu, sungai ini juga dimanfaatkan untuk irigasi, kehidupan sehari-hari, dan festival budaya (Salehah & Falasifah, 2024).



Gambar 1. Sungai Bengawan Mati
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Pemanfaatan sungai yang dilakukan oleh warga sebagai sumber hidup mereka tidak lepas peranan dari pihak desa untuk membina dan mengawasi. Pemerintah desa menjadi peran sentral dalam memanfaatkan aset lokal berupa sungai dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwasannya Aset Desa berupa tanah kas Desa, Tanah Ulayat, pasar desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset 2 desa lainnya. Sungai bengawan mati memiliki potensi aset yang meliputi sektor perikanan, pertanian, dan sosial budaya yang dapat menjadi modal dalam pembangunan desa yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Desa memiliki wewenang untuk melaksanakan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah desa memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator, pemberdaya dan pengawas. Fungsi regulator berfungsi menyusun regulasi/pedoman pengelolaan sungai, fasilitator berfungsi sebagai penyedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pemberdaya yang menjadi pendorong dalam keterlibatan masyarakat, dan pengawas yang memastikan pengelolaan sesuai dengan semestinya dan dapat berkelanjutan (Prasasti & Ma'ruf, 2025). Aset lokal desa berupa sungai di tengah pemukiman warga menjadikan potensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam sektor ekonomi. Hal ini menjadikan potensi lokal sangat penting untuk keberlanjutan di masa mendatang. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan bahwa peran pemerintah desa belum optimal terhadap sungai bengawan mati sebagai aset desa. Sungai bengawan mati yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat nyatanya masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaannya. Belum adanya regulasi untuk mengorganisir pemanfaatan secara jelas dan pemberdayaan masyarakat dalam program pelatihan keterampilan dan pengelolaan ekosistem sungai masih minim.

Berdasarkan kondisi tersebut tidak hanya pemerintah desa, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengelolaan aset sungai. Partisipasi masyarakat mendorong adanya rasa tanggung jawab bersama dan rasa memiliki sebab sebagian dari perekonomian mereka bergantung dengan sungai. Pidarta (2006 : 340) menjelaskan bahwasannya partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan individu atau kelompok pada kegiatan tertentu dengan keterlibatan mental, fisik, emosi serta segala kemampuan yang dapat mendukung tujuan dan tanggungjawab (Sari & Salam, 022) Partisipasi masyarakat dibutuhkan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang dijalankan.

Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat agar pengelolaan sungai dapat berjalan berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan warga. Adapun itu, penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak menyoroti mengenai peran pemerintah desa serta partisipasi masyarakat untuk berperan dalam mengelola regulasi dan melakukan pemberdayaan. Atas dasar tersebut peneliti melakukan penelitian atas dasar urgensi yang diperoleh dan peneliti melakukan penelitian mengenai Peran Pemerintah Dalam Partisipasi Peningkatan Aset Desa Studi Kasus Sungai Bengawan Mati, Desa Tejoari, Lamongan yang berfokus pada peran pemerintah desa dan aspek partisipasi masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Kusumastuti, Anggraeni, Rustam, Desi, & Waseso, 2025) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai peran pemerintah desa dalam partisipasi peningkatan aset desa melalui pratinjau partisipasi masyarakat. Fokus penelitian ini ada pada peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sungai berdasarkan indikator partisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1980), yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi (Safitri, Myrna, & Ismanto, 2022). Teknik pengumpulan data. Sumber data diperoleh langsung dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan data sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan undang-undang, dan literatur pendukung. Analisis data menggunakan model Miles dan huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Tejoasri dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Sungai Bengawan Mati berjalan cukup baik. Pertama, dalam aspek pengambilan keputusan, pihak desa telah mengadakan musyawarah desa sebagai forum aspirasi warga dari penyusunan rencana hingga kesepakatan tindakan. Pemerintah desa menentukan kesepakatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya. Masyarakat tidak hanya menerima keputusan tetapi ikut menentukan bersama dengan pihak pemerintah desa agar tujuan yang dicapai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil yang dibawa dalam musyawarah desa merupakan kesepakatan musyawarah pada tingkat dusun. Masyarakat diberi ruang aspirasi dan kebutuhan tetapi keputusan akhir tetap pada pemerintah desa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala desa sebagai berikut :

“Kita ada yang namanya musyawarah desa (musdes). Musyawarah desa itu kegiatan pengumpulan aspirasi warga-warga. Musyawarah desa ada setiap tahunnya, dan hal yang dibicarakan saat musdes juga sudah didiskusikan pada tingkat dusun terlebih dahulu. Untuk pihak yang diundang itu ada perangkat desa, BPD, pokmas (kelompok masyarakat), perwakilan pemuda, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga UMKM, perwakilan tiap dusun dan biasanya kurang lebih 70 orang menghadiri musyawarah desa.” (Wawancara, 12 November 2025).

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa juga menuturkan : *Aspirasi yang disampaikan pada pihak desa ditampung sehingga diberikannya kontribusi dari subsidi pemerintah desa berupa bantuan pakan, di bikin budidaya , wadah penggilingan, dan benih ikan. (Wawancara, 21 November 2025).*

Implementasi partisipasi dalam pengambilan keputusan di penelitian ini, Pemerintah Desa Tejoasri mengadakan musyawarah desa (musdes) atau biasa disebut dengan musdes yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Unsur pemerintahan desa disini melibatkan +-70 orang diantaranya perangkat desa, BPD, pokmas (kelompok masyarakat), perwakilan pemuda, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga UMKM, perwakilan tiap dusun. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari sekretaris desa bahwa program-program yang dilaksanakan merupakan hasil kesepakatan dari musyawarah desa. Aspirasi yang disampaikan dalam musyawarah desa akan ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah desa dalam bentuk saluran bantuan dari Dinas

Perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya ditampung tetapi juga diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai bentuk dukungan dan kontribusi.

Selain musyawarah desa, hal ini juga tercermin dalam kegiatan Sosialisasi Kelembagaan yang dilakukan bukan September tahun 2023 dengan mengundang perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pemateri dengan melibatkan aparatur desa, dan warga terkait. Kegiatan tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai struktural UMKM pengolahan abon dan petis hasil ikan dari budidaya keramba milik warga. Tak hanya itu, dalam kegiatan tersebut warga diberi pengetahuan mengenai kelembagaan desa oleh pemateri.



Gambar 2. Sosialisasi Kelembagaan Desa
Sumber: Diadaptasi dari Kegiatan P2MD Tahun 2023

Partisipasi masyarakat berperan penting dalam menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap program pembangunan desa. Saat masyarakat dilibatkan, mereka akan mendukung dan berperan aktif dalam berjalannya pelaksanaan. Hal ini akan berdampak terhadap citra desa juga taraf hidup masyarakatnya. Dengan demikian, timbulnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa atas aspirasi yang disampaikan.

Dalam konteks pemerintahan desa, partisipasi masyarakat diperlukan sebab merupakan pihak yang mengetahui kondisi nyata, kebutuhan dan permasalahan yang ada di lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap program pembangunan desa. Saat masyarakat dilibatkan, mereka akan mendukung dan berperan aktif dalam berjalannya pelaksanaan. Hal ini akan berdampak terhadap citra desa, taraf hidup masyarakatnya dan timbulnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa atas aspirasi yang disampaikan.

Kedua, aspek pelaksanaan mengacu pada keterlibatan warga dalam pelaksanaan program yang dijalankan. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan di lapangan dan mendorong rasa tanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian, hasil musyawarah menjadi pokok utama dalam pelaksanaan program dan pelaksanaan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Partisipasi ini tercermin dari keikutsertaan warga atas keberlangsungan kegiatan.

“Terkadang disini kita ada sosialisasi, jadi kita memberi ilmu dan keterampilan kepada nelayan berkaitan dengan profesi mereka sebagai nelayan, jadi kita menggandeng dinas perikanan untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat nelayan. Untuk kedatangan sendiri pasti mereka datang karena mereka juga membutuhkan.” (Wawancara dengan Kepala Desa,, 12 November 2025).

Selain itu, sinergi pemerintah desa, masyarakat, dan dinas terkait menciptakan program

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan. Keterlibatan masyarakat menunjukkan adanya rasa memiliki dan membutuhkan terhadap program sehingga dapat berjalan secara efektif. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Z (pembudidaya keramba), beliau mengatakan bahwasannya:

“Desa juga mengadakan sosialisasi dan tempatnya di balai desa tapi terkadang juga di pintu masuk desa tejoasri sini di dusun rengin karena ada jembatan dan sudah terlihat sungai jadi tidak mesti dilakukan di balai desa. Sosialisasi kemarin itu kita diajarkan cara merakit jala , wah itu bagus mba, nelayan merasa terbantu, karena disini tidak semua memiliki keramba ada juga yang nelayan tangkap”. (Wawancara, 21 November 2025).

Hasil musyawarah menjadi pokok utama dalam pelaksanaan program dan pelaksanaan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Partisipasi ini tercermin dari keikutsertaan warga atas keberlangsungan kegiatan.. Hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwa pemerintah desa menyelenggarakan kegiatan meningkatkan pengetahuan guna serta keterampilan sesuai dengan profesi mereka. Dalam pelaksanaanya, pemerintah desa menggandeng Dinas Perikanan untuk memberikan pendampingan. Dapat dilihat dari kehadiran warga yang antusias dalam menghadiri kegiatan sebab dinilai relevan dan dibutuhkan.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, salah satu masyarakat nelayan menyampaikan bahwa kegiatan tidak selalu diadakan di balai desa, tetapi juga di pintu masuk desa dan berada di dekat sungai. Tempat fleksibilitas yang memudahkan masyarakat untuk hadir dan mengikuti kegiatan. Materi yang disampaikan seperti pelatihan membuat jala, dirasa sangat bermanfaat terutama bagi nelayan tangkap yang tidak memiliki keramba sehingga program mampu menjangkau berbagai kelompok nelayan. Partisipasi masyarakat dalam menghadiri sosialisasi menunjukkan bahwasannya program benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Adanya program yang menjangkau baik nelayan tangkap maupun budidaya keramba, mereka sama-sama mendapatkan manfaat dari program yang dirancang.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan juga diwujudkan dengan kegiatan pengolahan abon dan petis ikan mujaer yang dilaksanakan di balai desa dengan mengundang perwakilan ibu-ibu di tiap dusun di Desa Tejoasri. Kegiatan pengolahan tersebut merupakan pengolahan dari hasil ikan budidaya milik warga yang berupa ikan mentah lalu diolah menjadi abon dan petis dari ikan mujaer. Pengolahan ini bertujuan untuk menambah nilai ekonomi dari hasil budidaya dan menjadi ciri khas dari Desa Tejoasri.



Gambar 3. Kegiatan Pengolahan Abon dan Petis
Sumber: Diadaptasi dari Kegiatan P2MD Tahun 2023

Antusiasme warga secara aktif menjadi indikator keberhasilan pemerintah desa dan warga dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, penyampaian informasi juga beragam yakni melalui berbagai media komunikasi seperti grup *Whatsapp*, pengeras suara masjid, surat undangan ataupun melalui penanggungjawab masing-masing kegiatan. Mekanisme penyebaran informasi ini guna memastikan seluruh masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan dapat berpartisipasi secara optimal dalam setiap program yang dilaksanakan.

Ketiga, aspek pengambilan manfaat, adalah hasil dari masyarakat dalam merasakan dan menggunakan program yang telah dilaksanakan. Tahapan ini terjadi dari hasil pelaksanaan program. Partisipasi pada tahap ini terlihat dari sejauh mana program memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya warga yang bergerak pada sektor perikanan.

“Ada bantuan dari Dinas Perikanan dan kami diberi benih ikan, pakan ikan, dan juga kebutuhan pendukung lainnya untuk keberlangsungan keramba”. (Wawancara dengan Bapak M selaku pembudidaya keramba, 21 November 2025).

“Kami menerima bantuan dari pihak pemerintah desa, tapi bantuannya itu tidak mesti berasal dari pemerintah desa kadang juga dari Dinas Perikanan. Ya bantuannya seperti umumnya bantuan seperti nelayan, ada pakan ikan, benih, seperti itu”. (Wawancara dengan Bapak Z selaku pembudidaya keramba, 21 November 2025).

Bantuan yang diterima oleh masyarakat nelayan di desa tejoasri sangat membantu mereka meskipun tidak secara rutin ada tetapi keberadaannya dapat membantu nelayan terutama pada saat kondisi ikan sulit akibat perubahan musim atau kualitas air yang menurun. Selain itu, nelayan mendapatkan manfaat dari hasil mereka menangkap maupun budidaya keramba. Hasil tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut wawancara yang Bapak H selaku pembudidaya keramba, beliau menuturkan:

“Penghasilan dari nelayan ini dari tangkap ikan maupun budidaya keramba kami ambil sendiri tidak ada pembagian ke desa”. (Wawancara, 21 November 2025)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak M (pembudidaya keramba), bahwasannya untuk penghasilan dari keramba maupun nelayan tangkap kita kantong sendiri dan hasil ikan tangkap maupun budidaya kami menjualnya langsung ke pasar. Masyarakat memanfaatkan hasil budidaya dan ikan tangkap secara mandiri secara langsung dan dijual dalam bentuk mentah. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat disini terlihat langsung dari penghasilan yang diterima oleh nelayan dan diperkuat dengan bantuan pihak pemerintah desa dan Dinas Perikanan sebagai bentuk dukungan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat merupakan tahapan penting karena menentukan keberhasilan dari suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan.



Gambar 4. Keramba Budidaya
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026

Hasil di atas menjelaskan bahwasannya terdapat bantuan yang diberikan oleh dinas terkait untuk mendukung aktivitas warga di sungai. Bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk manfaat yang diterima secara nyata oleh warga. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah desa dan instansi terkait dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga bahwasannya nelayan menerima bantuan dari Dinas Perikanan terkait berupa benih ikan, pakan ikan serta sarana pendukung lainnya. Bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk manfaat yang diterima secara nyata.

Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, warga lain menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya dari pemerintah desa tetapi juga dari Dinas Perikanan. Bentuk bantuan yang diberikan umumnya berupa pakan ikan dan benih yang merupakan kebutuhan bagi nelayan maupun pembudidaya keramba. Bantuan yang diterima oleh masyarakat nelayan di Desa Tejoasri dinilai sangat membantu. Keberadaan bantuan tersebut menjadi penting dikarenakan kondisi tertentu yang tidak dapat di prediksi, misalnya akibat perubahan musim atau menurunnya kualitas air. Dalam kondisi tersebut, bantuan menjadi penopang bagi nelayan agar tetap menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Selain itu, bantuan bermanfaat lainnya dirasakan oleh nelayan dan pembudidaya keramba yakni hasil dari yang mereka menangkap dan budidaya sepenuhnya menjadi hak sendiri tanpa ada pembagian dengan pihak desa. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat terlihat jelas dengan kemandirian warganya dalam mengelola dan memanfaatkan hasil usaha mereka. Masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari hasil tangkap ikan maupun budidaya keramba.

Ketiga, aspek evaluasi, partisipasi masyarakat dalam tahap ini masih tergolong rendah. Evaluasi program belum dilakukan dan belum melibatkan masyarakat secara aktif. Terdapat perbedaan sudut pandang antara pemerintah desa dan warga terkait proses pembangunan, di mana masyarakat melihat pembangunan berorientasi secara langsung sedangkan pemerintah desa menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas pelaksanaan.

“Untuk kendala sendiri dari warga itu bahwa warga memiliki mindset pembangunan 90% itu fisik, selain itu juga keterbatasan SDM dari perangkat desa untuk mengeksekusi, juga

aspirasi yang disampaikan terkadang belum terlalu urgensi untuk masyarakat. Evaluasi dengan masyarakat sendiri tidak ada”. (Wawancara dengan Kepala Desa., 12 November 2025).

Dari wawancara yang dilakukan kepada kepala desa dapat dilihat bahwasannya masih ada perbedaan mengenai cara pandang dalam melihat pembangunan desa melalui program-program yang direncanakan. Adapun wawancara bersama Bapak M (pembudidaya keramba), beliau mengatakan:

“Saya berharap kepada pihak desa untuk aspirasi nelayan dapat lebih diperhatikan dalam agenda pembangunan desa”. (Wawancara, 21 November 2025).

Adapun wawancara bersama Bapak Z (pembudidaya keramba), menuturkan:

“Dari kegiatan-kegiatan di desa ini yang berkaitan dengan kami sebagai nelayan juga ada yang budidaya, kita merasakan dampaknya dari pemerintah yakni dari Dinas Perikanan, untuk pihak desa sendiri masih belum, karena bantuan yang kami terima itu seringkali dari dinas melalui pemerintah desa sebagai pihak pembantu penyelenggaraan”. (Wawancara, 21 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa menunjukkan bahwasannya masih terdapat kendala dalam evaluasi program. Kendala utama ada pada pola pikir sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa pembangunan desa sebatas pada pembangunan fisik. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dari perangkat desa dalam mengeksekusi program. Kepala desa juga menyampikan bahwa aspirasi yang disampaikan terkadang belum sebagai kebutuhan. Berdasarkan pernyataan diatas, menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dari pemerintah desa dan masyarakat dalam konsep pembangunan desa.

Pemerintah desa menekankan pada urgensi sementara masyarakat menilai dari dampak yang dirasakan langsung. Perbedaan inilah berpengaruh terhadap evaluasi yang belum melibatkan masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu warga bahwasannya berharap agar aspirasi warga dapat diperhatikan dalam agenda pembangunan desa. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan penilaian terutama terkait bersentuhan pelaksanaan langsung dengan yang mata pencaharian mereka sebagai nelayan ataupun pembudidaya. Sementara itu, warga lain mengatakan bahwa manfaat program yang dirasakan selama ini merupakan bantuan yang berasal dari instansi terkait bukan dari inisiatif pihak desa langsung.

Pemerintah desa lebih berperan dalam fasilitator dalam penyaluran bantuan. Hal ini menyebabkan timbulnya persepsi bahwasannya pemerintah desa belum maksimal dalam mendukung kegiatan nelayan ataupun pembudidaya. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ini belum berjalan secara efektif. Tidak terdapat forum evaluasi untuk menghasilkan umpan balik sehingga belum terserap optimal. Diperlukan penyelerasan kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membuka ruang diskusi agar evaluasi program dapat berjalan secara partisipatif dan mampu menjawab aspirasi secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi ini belum berjalan secara efektif. Tidak terdapat forum evaluasi untuk menghasilkan umpan balik sehingga belum terserap optimal. Diperlukan penyelerasan kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membuka ruang diskusi agar evaluasi program dapat berjalan secara partisipatif dan mampu menjawab aspirasi secara menyeluruh.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa penelitian ini telah berjalan cukup baik dalam aspek partisipasi masyarakat namun pelaksanaan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya terprogram dan berkelanjutan. Partisipasi dalam pengambilan dapat dilihat melalui pelaksanaan musyawarah desa (musdes) sebagai forum penyampaian aspirasi warga meskipun keputusan akhir tetap pada pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ditunjukkan dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan menggandeng dinas terkait. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam aspek ekonomi.

Nelayan dan pembudidaya keramba disini memperoleh manfaat berupa bantuan pakan, benih ikan, serta sarana pendukung mata pencaharian mereka. Dukungan dari pemerintah desa dan dinas memperkuat keberlanjutan pemanfaatan sungai bagi kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program belum berjalan dengan baik dan optimal. Dijelaskan bahwasannya belum terdapat forum evaluasi secara khusus yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk menilai dari pelaksanaan yang telah berjalan dan evaluasi masih bersifat internal. Selain itu, terdapat perbedaan cara pandang antara pemerintah desa dan masyarakat terkait konsep pembangunan. Hal ini menyebabkan kondisi aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi, sehingga diperlukan forum evaluasi partisipatif di masa mendatang agar program kedepan dapat maksimal sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun saran sebagai tindak lanjut di masa mendatang sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Tejoasri perlu mengadakan forum evaluasi secara rutin atau setelah program dilaksanakan. Hal ini berguna sebagai sarana penyampaian *feedback* dan perbaikan di masa mendatang.
2. Pemerintah Desa disarankan untuk meningkatkan peran yang tidak hanya fasilitator tetapi juga inisator terutama dalam pengembangan kegiatan pemanfaatan sungai. Diberlakukan dengan mengadakan program kegiatan mengenai penjagaan ekosistem wilayah sungai ataupun keterampilan dalam mengolah hasil perikanan.
3. Pemerintah desa perlu melakukan kegiatan peningkatan kapasitas/kompetensi bagi aparatur desa dengan mengadakan kegiatan pelatihan atau menggandeng organisasi pemuda dalam proses kegiatan bersama masyarakat desa.

REFERENSI

- Afriansyah, Afdhal, Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., . . . Abdurohim. (2023). *PEMBERDAYAAN MASYARKAKAT*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Agustina, E. S., & Latte, J. (2023). *PENGARUH POTENSI UMBER DAYA ALAM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI DESA HANTAKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH* (Vol. 5). *JURNAL ADMINISTRASI NIAGA*. doi:<https://doi.org/10.36658/ijan.5.1.100>

- Alaslan, A., Amane, A. P., Suharti, B., Laxmi, Rustandi, N., Sutrisno, E., . . . Richway. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. (A. Hidir, Ed.) Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia .
- Dasor, Y. W., Hermaditoyo, S., & Hudin, R. (2023). *Nilai-Nilai Good Governance dalam Tata Kelola Lembaga Adat Masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur* (Vol. 5). Jurnal Adat dan Budaya.
- Dewi, R. C., & Suparno. (2022). *MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK* (Vol. 7). Jurnal Media Administrasi.
- Fauzi, A., Nisa, B., Napitupulu, D., Abdillah, F., Utama, A. S., Zonyfar, C., . . . Sumartiningsih, M. S. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah, Banyumas: CV. Pena Persada.
- Fitriyanti, Hasna, N., & Amanda, S. (2025). *Optimalisasi Pengelolaan Material Hasil Penggalan Pada Proyek Normalisasi Sungai Lapajung Kabupaten Soppeng* (Vol. 3). Jurnal Teknik Sipil universitas Lamappapoleonro (JTEKSIL). doi:10.57093/jteksil.v3i2
- Haryono, D., & Marlina, L. (2021). *Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Stunting di desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya* (Vol. 3). The Indonesian Journal of Politics and Policy.
- Hasanah, S. W., & Setiawati, B. (2022). *Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong* (Vol. 5). Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis.
- Hermawan, E., Pebriyani, D., Julianty, D. N., Safitri, F., & Laksono, G. T. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat* (Vol. 2). Jurnal Inovasi Penelitian.
- Kushartono, T., Rohayatin, T., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2022). *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata kelola Aset Desa* (Vol. 6). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Kusumastuti, S. Y., Anggraeini, A. F., Rustam, A., Desi, D. E., & Waseso, B. (2025). *Metodologi Penelitian*. (Y. Agusdi, Ed.) PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Luturnas, J., Hasibuan, K., Wessy, L., Taufiq, M., & Sony, E. (2024). *Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara* (Vol. 7). Junral Kolaboratif Sains.
- Makalew, M. N., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). *Koordinasi Antara Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama di Kota Manado* (Vol. 1).
- Mandhaputri, H. A., Aribowo, & Riasih, T. (2023). *PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KARAMATWANGI (Studi Kasus di Kawasan Pengembangan Kentang, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut)* (Vol. 5). LINDAYASOS : Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.
- Maranjaya, A. K. (2022). *GOOD GOVERNANCE SEBAGAI TOLAK UKUR UNTUK MENGUKUR KINERJA PEMERINTAHAN* (Vol. 2). Jurnal Sosial dan Teknologi.

- Prasasti, P. F., & Ma'ruf, M. F. (2025). *Analisis Peran Pemerintah desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)* (Vol. 2). Socius : Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.
- Purba, Y. S., & R., S. H. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum Dan Aanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Jandiraya Kecamatan Dolog Masagal Kabupaten Simalungun* (Vol. 9). JURNAL KOMUNIKASI & ADMINISTRASI PUBLIK.
- Putra, I. A. (2023). *UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DENGAN BUDIAYA IKAN TAWAR DI AAN SECRET WATERFALL KABUPATEN KLUNGKUNG* (Vol. 4). JIPMAS : Jurnal Visi Pengabdian Masyarakat.
- Rahayu, S. S. (2022). *Teori-Teori Pemerintahan*.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dala Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow* (Vol. 1). Jurnal Governance.
- Rozikin, M., & Haris, R. A. (2021). *PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL DI KABUPATEN SUMENEP : PENDOORNG DAN PENGHAMBAT* (Vol. 6). PUBLISIA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Safitri, N., Myrna, R., & Ismanto, S. U. (2022). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Di Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi* (Vol. 14). JANE (Jurnal Administrasi Negara).
- Sakti, F. T., Paisal, R. M., Rohmatullah, M., Fadillah, N. A., & Ihsani, P. S. (2021). *PERAN KEPEMIMPINAN PERANGKAT PEMERINTAH DESA DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN* (Vol. 19). Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial.
- Salehah, J. F., & Falasifah, N. (2024). *Revitalisasi Sungai sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi di Desa Lebak Jabung Mojokerto* (Vol. 1). CV Omah Kreator Ponorogo - Indonesia.
- Sari, F. L., & Salam, R. (022). *PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN* (Vol. 28). Jurnal Administrasi Negara.
- Sari, H. D. (2022). *Asas dan Fungsi Pemerintahan : Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik*.
- Subakti, H., Hurit, R. U., Eni, G. D., Yufrinalis, M., Maria, S. K., Adwiah, R., . . . Amane, A. P. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. (S. Bahri, Ed.) CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Tampubolon, M., Simanjutak, N., & Silalahi, F. (2023). *Birokrasi & Good Governance*. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Tarigan, D. E., Subhilhar, & Thamrin, H. (2021). *Analisis Peran dna Fungsi Internal Audit Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Terhadap Penyelenggaraan Ursan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Deli Serdang* (Vol. 7).

- Tunnaja, W. S., & Mubarak, A. (2022). *Fungsi Pemberdayaan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat desa Agusen Kecamatan Blangkejeren* (Vol. 5).
- Utami, N., Saragih, R. F., Daulay, M., Maulana, M., & Ramadani, P. (2023). *PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS PEMBANGUNAN SOSIAL DAN EKONOMI INDONESIA* (Vol. 2). *Journal of Management and Social Sciences*.
- Wasdi. (2022). *Peran Pemerintah Desa dalam Membangun Sumber Daya Manusia di Desa Pedanfkamulyan* (Vol. 3). *Junral Indonesia Sosial Sains*.
- Welean , T., Mantiri, M. S., & Pati, A. B. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan* (Vol. 1). *JURNAL GOVERNANCE*.
- Wulandani, S. A., Amalia, T., & Yusra, Z. N. (2022). *Optimalisasi Traget dan Realisasi Pajak Pada E-Filling di Kota Bandung* (Vol. 1). *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa